

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Pengelolaan pengadaan barang dan jasa merupakan faktor penting dalam kelancaran dalam menjalankan semua tugas dan fungsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar. Pada pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagian maupun seluruhnya dananya dibiayai oleh APBN/APBD yang dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif.

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu kegiatan yang diadakan oleh penyedia yang digunakan untuk memenuhi serta mendapatkan segala sesuatu benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang menjadi bagian terpenting didalam pemenuhan kebutuhan setiap instansi pemerintahan.

Pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ditemui kendala yang dihadapi, seperti rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan katalog elektronik. Kendala lainya yang dihadapi yaitu lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat menimbulkan celah terjadinya tindak pidana korupsi.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintahan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara melakukan sosialisai tentang pengelolaan barang dan jasa dengan baik dan benar agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan maka terdapat beberapa saran yang harus diperhatikan untuk merubah menjadi lebih baik,yaitu :

- 1) Untuk mengurangi kendala yang terjadi dalam pengelolaan anggaran belanja barang dan jasa agar Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar khusus dalam pencairan dana dapat meningkatkan kerja sama yang lebih baik dan juga menjalin komunikasi agar dapat mengoptimalkan kinerja para staf dan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga menghindari teguran dari pejabat daerah.
- 2) Selama satu tahun anggaran yang sedang berlangsung, dalam melakukan semua hal kegiatan dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap akhir hendaknya dapat dipertanggung jawaban kegiatan yang ada ,agar tidak terjadi kesalahan dan berbagai kendala yang terjadi hingga menumpuk dan pada akhirnya melupakan membuat laporan pertanggung jawaban atas kegiatan yang telah berlalu yang terbilang cukup lama.
- 3) Bagi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan (LKPP) meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada mampu memahami mengenai pengelolaan katalog elektronik sehingga pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik menjadi efektif, dan dapat melakukan sosialisasi untuk instansi untuk merealisasikan program dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih.

